



Pemberdayaan Masyarakat dalam Memanfaatkan Alokasi Dana Desa Sabulira Toba Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una

Rilfayanti Thomassawa^{a,1}

^a Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Sintuwu Maroso, Poso, Sulawesi Tengah, 94619

¹ ipapoenya@gmail.com*

*korespondensi penulis

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 10-02-2021

Disetujui: 21-03-2021

Kata Kunci:

Pemberdayaan Masyarakat,
Alokasi Dana Desa (ADD)

ABSTRAK

Abstrak: Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama masyarakat yang lemahnya dalam berpartisipasi, dan kelompok yang terbaikannya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Metode yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun temuan dalam penelitian ini yaitu tingkat partisipasi masyarakat Desa Sabulira Toba dapat dilihat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan yang tergolong baik dalam partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan pembangunan dan evaluasi. Faktor pendukung dan penghambat diantaranya dukungan dari Pemerintah Pusat, Kabupaten dan Pemerintah Desa yang kooperatif dan komunikasi efektif dalam meregulasikan ADD di wilayah Desa Sabulira Toba sehingga pelaporan pertanggung jawaban dapat dilaporkan dengan waktu yang telah ditentukan, partisipasi masyarakat meningkat karena kesadaran untuk membangun desa telah tertanam dari dalam diri mereka untuk berkontribusi dalam Pemanfaatan ADD, Sikap mental Pemerintah desa yang transparan, akuntabel dalam memanfaatkan ADD, masyarakat kritis dalam mengawasi pelaksanaan ADD sehingga meminimalisir terjadinya penyelewengan dana ADD dan Minimnya ketersediaann dana ADD yang tidak semuanya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat desa.

Abstract: Community empowerment is a process of empowering people who are less involved in participating, and some people are neglected to be supported so improve their welfare to be independent. The method used is observation, interviews and documentation. The findings of this study obtain that the level of community participation in Sabulira Toba Village can be seen at the planning, implementation and supervision stages which are classified as good. Supporting and inhibiting factors are support from the Central Government, Regency and Village Governments who are cooperative and effective communication in regulating ADD in Sabulira Toba Village area so that accountability reports can be reported at a predetermined time. Community participation has increased because awareness to develop villages has been embedded from them self to contribute ADD utilizing; the mental attitude of the village government is transparent, accountable. The community is critical in supervising the implementation of ADD so as to minimize the occurrence of misappropriation of Village Fund Allocation and the lack of availability of ADD that can not accomodate all the needs of village communitiess.



PENDAHULUAN

Berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar

yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang.

Keberadaan desa secara formal diakui dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi dana desa sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan alokasi dana desa di desa Sabulira Toba, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan alokasi dana desa di desa Sabulira Toba.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian lapangan dan dilakukan pada masyarakat yang sebenarnya untuk menemukan realitas apa yang tengah terjadi mengenai masalah tertentu. Dalam hal ini penelitian akan difokuskan pada pengumpulan data lapangan yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan yang dibiayai oleh alokasi dana desa di desa Sabulira Toba. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam data primer dan data sekunder. Sumber data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber resmi dokumen-dokumen kepustakaan dan dokumen dari berbagai sumber resmi surat keputusan peraturan perundang-undangan, laporan penelitian. Selain itu melalui literatur, media elektronik dan data-data lain berupa informasi dari internet serta yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Sumber data primer yaitu informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi di lapangan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Tokoh Masyarakat, Masyarakat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif bersifat memaparkan secara mendalam hasil *riset* melalui pendekatan bukan angka atau *nonstatistik*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan ADD ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana Pemanfaatan ADD terhadap pemberdayaan didesa Sabulira Toba dalam prespektif pemberdayaan masyarakat. Pergeseran paradigma pembangunan dari pembangunan ekonomi ke pemberdayaan masyarakat mengharuskan pengelolaan keuangan desa lebih diarahkan kepada pemberdayaan potensi yang dimiliki masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya pengelolaan ADD lebih difokuskan kepada pemberdayaan masyarakat untuk

mendorong kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Pemanfaatan ADD Sabulira Toba harusnya mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah desa agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sabulira Toba itu sendiri. Salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat untuk dikembangkan menjadi lebih baik, agar masyarakat bisa mandiri dan mampu menciptakan kesejahteraannya secara mandiri pula. Dalam rangka pengoptimalan memanfaatkan ADD dalam pemberdayaan masyarakat haruslah melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapnya baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pengawasan/evaluasi. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap tersebut bertujuan agar masyarakat paham dengan apa yang mereka butuhkan dan apa yang akan mereka lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sabulira Toba.

Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Perencanaan

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Bentuk sumbangsih masyarakat bukan hanya berupa tenaga melainkan juga bisa buah pikiran. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini merupakan salah satu kunci penting dalam keberhasilan pembangunan desa Sabulira toba.

Proses partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan di Desa Sabulira Toba dimulai dari tahap yang paling bawah yaitu musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat dusun kemudian musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa.

Pelaksanaan pembangunan diserahkan oleh Pemerintah Sabulira Toba kepada Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK). Tahap pelaksanaan pembangunan diawali dengan kegiatan sosialisasi pertemuan mengenai program kerja desa, kemudian masyarakat menghadiri kegiatan sosialisasi yang dilanjutkan dengan penentuan kelompok sebagai eksekusi dalam pelaksanaan pembangunan. Pada tahap pelaksanaan pembangunan ini, pola partisipasi masyarakat tercermin ikut andilnya masyarakat dalam melaksanakan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sabulira Toba.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Sabulira Toba adalah partisipasi tenaga/swadaya. Partisipasi tenaga yaitu partisipasi yang dilakukan secara bergotongroyong pada setiap pelaksanaan pembangunan.

Tahap Evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi merupakan partisipasi masyarakat dalam menilai keberhasilan program pembangunan yang dikelola dengan keuangan desa. Tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi ini sangat penting, karena dalam program pembangunan masyarakat merupakan penggerak dari pembangunan maka sudah seharusnya masyarakat dilibatkan dalam hal evaluasi pembangunan bertujuan agar dapat dicapai pembangunan seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah dan kendala yang muncul dalam

pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan serta mencari solusi pemecahan dalam setiap permasalahan mengenai pembangunan yang dilaksanakan.

Untuk melakukan evaluasi maka perlu melewati beberapa tahap evaluasi yaitu: (1) Menetapkan apa yang akan dievaluasi; (2) Menyusun rencana evaluasi; (3) Pengumpulan data; (4) Analisis dan presentasi data; dan (5) Pengambilan keputusan.

Pada tahap evaluasi ini masyarakat di Desa Sabulira Toba diberikan ruang untuk ikut berpartisipasi mengevaluasi pembangunan, salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi ini adalah terlibat langsung ke dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sabulira Toba yang dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk melakukan evaluasi pembangunan.

Pada pelaksanaan program kerja ADD dalam partisipasi masyarakat di Desa Sabulira Toba Kecamatan Ratolindo dilakukan dengan asas transparansi keuangan pengelolaan ADD. Transparansi adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan, belanja serta pembiayaan desa sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan perundang-undangan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh masyarakat.

Transparansi anggaran desa merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Sebagai salah satu bentuk transparansi publik terhadap pengelolaan keuangan desa yaitu terdapatnya pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat. Salah satu bentuk pengumuman kebijakan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sabulira Toba yaitu melalui media baliho atau papan pengumuman penggunaan anggaran.

Menurut penjelasan kepala desa Sabulira Toba bahwa, “Pemasangan baliho ini dilakukan atas dasar prinsip transparansi keuangan desa. Selain itu, kegiatan-kegiatan desa juga akan diberitakan melalui website desa dan berisikan kegiatan yang dilaksanakan terkait pengelolaan keuangan desa”.

Berdasarkan informasi yang dijelaskan oleh Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Sabulira Toba dapat disimpulkan bahwasanya dalam prinsip pemberian dokumen yang mudah diakses, Pemerintah Desa Sabulira Toba telah melakukan prinsip ini melalui laporan anggaran desa yang disediakan. Selain itu, dokumen anggaran juga bisa masyarakat akses melalui pemberian dokumen anggaran pada setiap pertemuan atau sosialisasi pelaksanaan pembangunan. Sistem informasi anggaran adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi organisasi yang bersifat manajerial dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Desa Sabulira Toba berdasarkan analisa wawancara yang dilakukan, penulis menemukan sistem pemberian informasi anggaran kepada masyarakat Desa Sabulira Toba dilakukan melalui sosialisasi anggaran.

Berdasarkan informasi yang jelaskan oleh Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Sabulira Toba di atas maka dapat diketahui bahwa prinsip sistem pemberian informasi anggaran yang dilakukan oleh

Pemerintah Desa Sabulira Toba sudah dilakukan baik. Sistem pemberian informasi anggaran Desa Sabulira Toba ini dilakukan melalui sosialisasi ke setiap dusun.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan ADD dalam partisipasi masyarakat desa Sabulira Toba

Sebagaimana informasi yang diperoleh dari Kepala Desa Sabulira Toba menyebutkan bahwa Desa Sabulira Toba menerima ADD sejak tahun 2014. Pemerintah desa selama ini telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kecamatan, seperti menanyakan tentang kesulitan yang dialami oleh masyarakat dan juga sosialisasi mengenai jumlah ADD maupun menempelkan poster-poster ADD pada jalan umum.

ADD yang telah digulirkan ke masyarakat selama ini telah bermanfaat dengan baik seperti yang dituturkan oleh Kepala Desa dan masyarakat seperti perbaikan infrastruktur jalan satu kampung yang dibetonisasi dan pembuatan senderan jalan. Jadi keseluruhan ADD dimanfaatkan secara operasional 30% untuk belanja pegawai, tunjangan BPD, uang representasi BPD, tunjangan LKMD, tunjangan kades, dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat.

Penyaluran ADD telah melibatkan masyarakat dengan baik melalui musrenbangdes, sehingga segala kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik melalui ADD. Hal ini bukti bahwa ADD yang berada di Desa Sabulira Toba realitanya telah dapat memberdayakan masyarakat. Tidak hanya itu masyarakat Desa Sabulira Toba juga dilibatkan dalam proses perencanaan, dengan proses awal melalui musyawarah dusun (musdus). Pada forum itu masyarakat diberikan kebebasan untuk menuangkan ide-idenya dan bahkan ada masyarakat yang mengajukan proposal pada saat musyawarah dusun berlangsung. Dalam hal pengawasan, masyarakat juga dilibatkan meninjau ulang kegiatan ADD karena pemerintah desa bersikap transparan dan akuntabel dalam mengimplementasikan ADD di masyarakat.

Faktor pendukung yang ditemui masyarakat dalam pemanfaatan ADD adalah pemerintah desa bersikap transparan kepada masyarakat mengenai jumlah ADD yang diterima dari kabupaten dan juga adanya dukungan SDM yang mampu mempersiapkan SPJ dengan tepat waktu. Penyelesaian SPJ tepat waktu merupakan suatu pemberlakuan mengingat apabila SPJ tahap I belum diajukan kepada Bapermasdes maka SPJ tahap kedua tidak akan dicairkan kembali, dan justru SPJ Tahap I merupakan kebenaran administrasi yang semestinya dapat segera dipertanggung jawabkan.

Masyarakat Desa Sabulira Toba menjelaskan bahwa Pemerintah Desa melakukan sosialisasi ADD kepada mereka melalui rapat-rapat musdus dan musdes dengan mengundang masyarakat desa dan semua elemen di desa. Masyarakat mengatakan bahwa ADD yang diterima Desa Sabulira Toba sangat bermanfaat oleh masyarakat karena sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penyaluran ADD berdasarkan informan dari masyarakat telah melibatkan masyarakat dengan baik karena penyaluran sesuai rencana (JOP masing-masing) yang kesemuanya itu atas kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Kronologis penyaluran ADD dijelaskan lebih lanjut oleh kepala desa bahwa setelah menerima

uang ADD kemudian pemerintah desa mengundang JOP masing-masing dan melakukan musyawarah di balai desa.

Dalam mengelola ADD, masyarakat melakukan musyawarah, usulan pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dengan melibatkan masyarakat langsung, BPD, perangkat desa dan semua unsur desa. Bahkan dengan adanya ADD kesejahteraan masyarakat meningkat karena kebutuhan penunjang dan urgensi bagi masyarakat telah terpenuhi, sekaligus jumlah pengangguran telah menurun. Masyarakat miskin di Desa Sabulira Toba juga sudah berangsur berkurang karena mendapat penanganan yang baik.

Pelatihan oleh pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten sudah terselenggarakan di aula kecamatan. Berdasarkan informasi dari masyarakat, mereka selama ini ikut memelihara ADD secara baik sesuai dengan keahliannya masing-masing. Adapun faktor pendukung dalam mengelola ADD di Desa Sabulira Toba adalah ADD yang bergulir di masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan pada dana yang masih minimalis yang belum biasa merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat secara langsung. Alokasi Dana Desa merupakan bantuan hibah dari pemerintah yang diperuntukan bagi kemajuan masyarakat desa khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ADD yang diprioritaskan untuk kemajuan desa, pada dasarnya mengacu dan menggunakan prinsip-prinsip partisipatif.

Untuk menciptakan partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan diperlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang sama. Strategi yang bisa diterapkan adalah penyadaran. Untuk berhasilnya program tersebut warga masyarakat dituntut untuk terlibat tidak hanya dalam aspek kognitif dan praktis tetapi juga keterlibatan emosional. Seperti yang terjadi di sampel penelitian masyarakat berinisiatif sendiri untuk membangun wilayahnya, karena mereka menganggap bahwa desa tempat mereka mengadu nasib dan tempat bernaung bagi keluarganya. Rasa memiliki yang sangat kuat disamping sifat ke gotong royongan yang melekat dalam diri masyarakat, mengindikasikan pengelolaan ADD berdasarkan prinsip partisipasi melalui perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan telah terlaksana dengan baik..

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemberdayaan dalam memanfaatkan ADD di desa Sabulira Toba sudah melibatkan partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat Desa Sabulira Toba dapat dilihat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan yang tergolong baik dalam partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam tahap ini sudah dilakukan dengan baik partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah kehadiran masyarakat dalam Musrenbangdes yang mencapai 80% dari semua masyarakat yang di undang.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat diantaranya yaitu

1) Faktor pendukung

- a. Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa yang berkomperatif dan komunikasi efektif dalam meregulasikan ADD di wilayah Desa Sabulira Toba sehingga pelaporan pertanggung jawaban dapat dilaporkan dengan waktu yang telah ditentukan.
- b. Partisipasi masyarakat meningkat karena kesadaran untuk membangun desa telah tertanam dari dalam diri mereka untuk berkontribusi dalam pengelolaan ADD.
- c. Sikap mental Pemerintah desa yang transparan, akuntabel dalam memanfaatkan ADD.
- d. Masyarakat kritis dalam mengawasi pelaksanaan ADD sehingga meminimalisir terjadinya penyelewengan dana ADD.

2) Faktor penghambat

- a. Keterbatasan pada dana yang masih minimalis yang akan diperuntukan bagi kemajuan masyarakat desa khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- b. Minimnya ketersediaan dana ADD yang tidak semuanya dapat mengakomodir mengakomodir kebutuhan masyarakat desa..

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistiani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta: 2004
- Anita Fauziah, *Pemberdayaan Masyarakat*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depak RI, Malang: 2009
- Dhofir Zamakhsari, *Tradisi Pesantren*, PT. Matahari Bakti, Jakarta 1993
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT.Refika Aditama Bandung: 2010
- Gideens, Antony. *Sociology, Cambridge Polity pres.*Thn 1991
- GinandjarKartasasmita, *Administrasi Pembangunan, Perkembangan, Pemikiran Dan Praktiknya Di Indonesia*, PT. Reneka, Jakarta 1997
- Gunawan Sumodiningrat, *Memberdayakan Masyarakat*, PT.Radika Aditama: 2009
- Haris Herdiansyah, *wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001
- Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh*, PT.Remaja Grafindo Jakarta:2003 <https://sekolahdesa.or.id>
- Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 1995
- Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 2008
- Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2005
- Juhri dan Marsum Ahmadi, *Perubahan Sosial*, Gunung pesagi, Bandar Lampung 1998
- Lexy J.Moleong, *metode penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung: 1989
- Marzuki,*Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis Dan Sosial*, Ekonisia, Yogyakarta: 2005
- Muhammad Musa, *metodologi penelitian*, Fajar Agung, Jakarta: 1988
- M.Syaifuddin, *Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pengembangan Kelembagaan Pedesaan Majalah Mufidah Media Informasi Dakwah Pembangunan*, Vol 12 Juli 1999
- Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Dafe'I, *Pengembangan Masyarakat Islam*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung: 2001

- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bumu Aksara, Jakarta: 2006, Cet, Ke-VIII
- Only S.prijono dan A.M.W Pranaka, *Mengenai Pemberdayaan: konsep, Kebijakan dan Implementas*, CSIS: Jakarta 1996
- Pranakarta, Vidhyandik, *Proses Pemberdayaan Masyarakat*, Raja Wali, Bandung: 1996, Cet Ke-02
- Prijono, *Komunitas Pemberdayaan*, Alfabett, Jakarta: 2001, Cet Ke-2
- Proyek DFID, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Praktek*, diterbitkan Oleh DFID: 1987
- Risyanti Riza dan Roesmidi, *Pemberdayaan Masyarakat*, Alqaprint Jatinangor, sumedang 2006
- Suharsimi Arikunto, *Perosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1989
- Sujana Royat, *Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*, Jakarta Lembaga Kesra-RI 2007
- Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung 2015